**STUDI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**NURHIDAYATI**

**106104083**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2015**

# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa ”fakir miskin dan anak-anak terlantar, di pelihara oleh Negara”[[1]](#footnote-2)

Oleh karena itu, Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pembinaan gelandangan yang sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, pada Pasal 6 Ayat (1). Yang menegaskan bahwa “pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen”.[[2]](#footnote-3) Dengan adanya pembinaan tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sebagaimana kita ketahui gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Permasalahan gelandangan merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh para gelandangan adalah munculnya ketidak aturan sosial yang ditandai dengan kesemerautan, ketidaknyamanan dan ketidak tertiban serta mengganggu keindahan kota. Realitas masyarakat lapisan bawah ini merupakan golongan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tertentu, tempat tinggal ataupun relasi-relasi yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Mereka acap kali dianggap penyebab keresahan dan kerusuhan, sampah masyarakat, pengacau dan perusak kota, selain itu mereka jarang diperhitungkan bahkan tidak dianggap dalam kehidupan sosial masyarakat.

Gelandangan di kota Makassar mengalami peningkatan dan penurunan jumlah gelandangan yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar dalam setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Makassar jumlah gelandangan pada tahun 2012 adalah 232, tahun 2013 adalah 305, dan pada tahun 2014 adalah 213. tetapi itu belum semua gelandangan di Makassar yang terdata karena pada saat penjaringan masih banyak gelandangan yang belum tertangkap, karena ada beberapa gelandangan yang bersembunyi saat razia dilakukan, setelah selesai Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia gelandangan mulai beraksi lagi di tempat-tempat umum atau jalanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dalam menanggulangi dan pembinaan gelandangan dengan cara razia atau penjaringan terhadap gelandangan di mulai dari hari senin hingga jum’at, pendataan identitas gelandangan agar petugas mengetahui asal usul mereka dan mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis yang tertangkap, memberikan modal dan pembinaan, pengembalian ke daerah asal gelandangan.

Berdasarkan peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk pekerja anak. Namun, kenyataan yang tampak sekarang ini pemerintah belum mampu secara maksimal merealisasikan Undang-Undang tersebut. Begitu juga halnya dengan perhatian pemerintah terhadap gelandangan.

Pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa mekanisme pembinaan gelandangan masih belum efektif hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya gelandangan yang etika dan moralnya masih bertindak seperti gelandangan padahal telah melalui proses pendidikan etika dan moral, selain itu masih di temui gelandangan yang tidak mengikuti beberapa program bimbingan baik itu bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. Hal ini dikarenakan kejenuhan yang dialami para gelandangan akibat kurang kreatifitas para pembimbing dalam mengelolah kelas. Dapat pula dilihat kurangnya kerja sama antara Dinas Sosial dengan pihak-pihak yang lain dalam melakukan program pembinaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh para gelandangan adalah melalui program-programnya dan pembinaan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat gelandangan justru kurang dapat di rasakan oleh gelandangan itu sendiri. Hal ini dilihat bahwa program–program yang diadakan oleh pemerintah kurang dapat bermanfaat secara optimal walaupun menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Berdasarkan uraian di atas maka saya sebagai peneliti sangat perihatin terhadap anak-anak yang hidup dijalan, sering melakukan kerusakan dan terkadang terlibat dalam pergaulan bebas seperti ngelem hal ini perlu adanya perhatian khusus terutama dari Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap gelandangan seperti mengembangkan kemampuan serta keterampilan anak. Sekiranya tindakan tersebut dapat meminimalisir tingkat gelandangan di kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul yaitu**” Studi Tentang Perlindungan Dan Pembinaan Gelandangan Di Kota Makassar”.**

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah ini adalah:

* + - 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan dan pembinaan anak gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar?
1. Kendala apa yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam upaya meminimalisir gelandangan di kota Makassar?
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bentuk perlindungan dan pembinaan anak gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar
2. Mengetahui kendala apa yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam upaya meminimalisir gelandangan di kota Makassar.
3. **Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan bagi penulis sehingga dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan memperoleh pengalaman berharga dalam menyelesaikan masalah melalui metode ilmiah khususnya pada bidang yang di teliti.
2. Bagi lembaga perguruan tinggi, yaitu di harapkan dapat memberikan tambahan koleksi karya ilmiah khususnya dalam bidang yang di teliti serta dapat di jadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti lainnya untuk membantu dalam pembuatan skripsi yang relevan dengan judul tersebut.
3. Bagi Dinas Sosial, yaitu sebagai bahan masukkan dalam meminimalisir tingkat gelandangan di kota Makassar . Selain itu, dapat meningkatkn pembinaan terhadap gelandangan di kota Makassar.
4. Bagi masyarakat agar sekiranya menjadi bahan masukkan dan renungan untuk membantu pembinaan gelandangan.
5. Bagi pembaca, yaitu sebagai referensi dan acuan yang dapat di gunakan jika hendak mengadakan penelitian. Selain itu, dapat menambah wawasan mengenai gelandangan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Perlindungan hukum**

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.

Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidak pahaman dan ketidak mampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.[[3]](#footnote-4)

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental Right and Freedoms of Children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran,pornografi,perdagangan/penyalahgunan obat-obatan, mempererat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.[[4]](#footnote-5)

Adapun hak dan kewajiban anak berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 pasal 44 menegaskan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya.
3. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, guru, dan mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan negara, menyayangi teman serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya sehingga dapat melaksanakan etika dan ahlak mulia.
4. Orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengurus, memelihara, melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat danminatnya
5. Setiap masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
6. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi manusia setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental anak.[[5]](#footnote-6)

Selain itu berdasarkan pasal 45 menegaskan untuk mewujudkan hak dan kewajiban pemerintah daerah ini dilakukan pembinaan berupa :

1. Sosialisasi ke masyarakat umum dengan melakukan penyuluhan sosial dalam bentuk perorangan atau kelompok, baik melalui media elektronik, media cetak dan brosur, papan bicara dan dialok interktif
2. Melakukan pengawasan dan penyidikkan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh pihak POLRI dan PPNS
3. Pengawasan dilakukan oleh petugas yang ditugaskan untuk maksud tersebut bekerja sama dengan pihak satpol PP dan POLRI untuk melakukan pengawasan kepada pengguna jalan atau melakukan aktivitas atau berhenti dimana tempat itu dilarang untuk memberi uang atau barang serta menjual barang ditempat umum.
4. Setiap orang atau sekelompokorang yang menggunakan jalan bukan sebagai fungsi jalan dapat diberikan peringatan dan teguran, dapat diancam dengan kurungan atau denda melalui proses hukum yang berlaku
5. Setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemakain jalan yang melakukan pemberian uang atau barang dan atau membeli sesuatu atau bertransaksi dijalanan melalui pembuktian secara sepihak (dengan cara memotret dan atau merekam pelaku) selanjutnya dapat dilaporkan kepada pemerintah setempat atau pada pihak Dinas Sosial, Satpol PP dan POLRI.[[6]](#footnote-7)
6. **Pembinaan**
7. **Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.

1. **Asas Pembinaan Gelandangan**

Pembinaan gelandangan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 2) sebagai berikut:

* 1. Asas Pengayoman
	2. Asas Kemanusiaan
	3. Asas Kekeluargaan
	4. Asas Keadilan
	5. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
	6. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.[[7]](#footnote-8)
1. **Tujuan Pembinaan Gelandangan**

Pembinaan gelandangan dilakukan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 3) sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati, menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah.
3. Dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
4. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
5. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
6. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.[[8]](#footnote-9)
7. **Program Pembinaan Gelandangan**
8. **Pembinaan Pencegahan**

Pembinaan pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak gelandangan.

Pembinaan pencegahan meliputi:

1. Pendataan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 7) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

**Ayat 2:** Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

**Ayat 3:** Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)[[9]](#footnote-10).

1. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 8) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :

1. Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
2. Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

**Ayat 2:** Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.[[10]](#footnote-11)

1. Sosialisasi

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 9) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :

1. Sosialisasi secara langsung
2. Sosialisasi secara tidak langsung

**Ayat 2:** Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah.

**Ayat 3:** Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik.

**Ayat 4:** Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.[[11]](#footnote-12)

1. Kampanye

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan.

Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 10) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

**Ayat 2:** Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

**Ayat 3:** Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat.

**Ayat 4:** Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.[[12]](#footnote-13)

1. **Pembinaan Lanjutan**

Pembinaan Lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara :

1. Perlindungan

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 12) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya.

**Ayat 2:** Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

**Ayat 3:** Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi.

**Ayat 4:** Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.[[13]](#footnote-14)

1. Pengendalian Sewaktu-waktu

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 13) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI.

**Ayat 2:** Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum.

**Ayat 3:** Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.[[14]](#footnote-15)

1. Penampungan Sementara

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 14) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud.

**Ayat 2:** Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outbound).

**Ayat 3:** Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[[15]](#footnote-16)

1. Pendekatan Awal

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 15) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.

**Ayat 2:** Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.[[16]](#footnote-17)

1. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment)

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 16) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

**Ayat 2:** Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing.

**Ayat 3:** Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya.

**Ayat 4:** Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan tema bahas (case conference).[[17]](#footnote-18)

1. Pendampingan Sosial

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 17) sebagai berikut:

**Ayat 1:** Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan.

**Ayat 2:** Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.[[18]](#footnote-19)

1. Rujukan

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 18) sebagai berikut:

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.[[19]](#footnote-20)

1. **Usaha Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi adalah pemulihan (perbaikan/pembetulan) seperti sediakala, pengembalian nama baik secara hukum dan pembaharuan kembali[[20]](#footnote-21)

Usaha Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. **Gelandangan**
2. **Pengertian Gelandangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 bagian (C) menegaskan bahwa Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap[[21]](#footnote-22)

Menurut Suparlan “gelandangan yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap”[[22]](#footnote-23) selain itu juga Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.[[23]](#footnote-24) Semakin banyaknya gelandangan merupakan contoh yang ada saat ini merupakan bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang paling berpengaruh dan mendasari kenapa masalah sosial ini terjadi, apalagi fenomena sosial ini banyak kita temukan di perkotaan.

Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk mempertahankan didaerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pencopet, pencuri, pengemis, pengamen dan pengasong. Perjuangan hidup sehari-hari mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karena tekanan ekonomi, tapi juga tekanan sosial budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat atau petugas ketertiban kota.[[24]](#footnote-25) Pada masa dulu gaya hidup menggelandang justru di pandang sebagai sarana yang tepat untuk berjuang melawan pemerintah Colonial Belanda.

1. **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Gelandangan**

Daya dorong dari desa seseorang menjadi gelandangan antara lain:

1. Desa tidak lagi mampu memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sementara jumlah penduduk terus bertambah.
2. Tingkat pendidikan dan keterampilan rata-rata masyarakat desa rendah.
3. Faktor sosial budaya yang dijumpai pada desa-desa tertentu atau desa kemiskinan tidak menunjang upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan.
4. Kondisi alam pendesaan tertentu tidak menunjang kegiatan ekonomi dan pendidikan masyarakat desa.
5. Secara individu terdapat warga desa yang rawan menjadi gelandangan mempunyai sifat pemalas, pasrah pada nasib, tidak punya daya juang dan menolak pada perubahan.

Daya tarik kota bagi seorang untuk menjadi gelandangan yaitu :

1. Masyarakat menganggap dikota-kota besar mudah mencari pekerjaan dan mewujudkan impian.
2. Di kota tersedia banyak cara untuk dapat memperoleh uang dengan adanya ajakan atau bujukan teman.
3. **Kriteria Gelandangan**
4. Usia 18 tahun keatas, tinggal di sembarang tempat, hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum.
5. Tidak memiliki tanda pengenal atau identitas diri, berprilaku bebas/liar, terlepas dari norma-norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
6. Tidak memiliki pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas lain-lain.[[25]](#footnote-26)
7. **Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Keadaan Gelandangan**
8. Pekerjaan yang tidak tepat, dan tidak normative.

Faktor ini berkaitan dengan masalah ekonomi, yang biasanya diukur dari keterampilan, pekerjaan dan penghasilan.

1. Tempat tinggal yang tidak manusiawi, tidak sehat, tidak edukatif, merusak tatanan lingkungan.

Faktor ini berkaitan dengan tingkat pendidikan gelandangan relative rendah. Hal ini menjadi kendala gelandangan untuk mendapatkan pekerjaan di kota, dan termasuk kategori warga dengan tingkat kesehatan yang terendah kesehatan fisik.

1. Kondisi fisik dan mental gelandangan yang khas

Faktor ini berkaitan dengan masalah sosial:

1. Nilai keagamaan yang rendah yaitu nilai-nilai ini berkaitan dengan tidak memiliki rasa malu untuk meminta minta.
2. Nilai atau sikap pasrah pada nasib yaitu gelandangan menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan adalah takdir dari tuhan, sehingga mereka tidak ada upaya untuk melakukan perubahan.
3. Nilai kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang yaitu ada kebahagiaan tersendiri sebagai besar gelandangan yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau normal yang kadang-kadang membebani mereka.
4. Sikap masyarakat terhadap gelandangan yang kurang peduli.

Faktor ini tidak terkait dengan masalah lingkungan dan hukum. Gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal mereka tinggal yang sebetulnya dilarang dijadikan tempat tinggal dan gelandangan yang hidup berkeliaran dijalan-jalan dan tempat-tempat umum kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang dicatat dikelurahan RT/RW setempat[[26]](#footnote-27)

1. **Persoalan Yang Dihadapi Individu Gelandangan**
2. Tingkat kesehatan rendah

Dari segi kesehatan gelandangan termasuk kategori warga tingkat kesehatan rendah yaitu kesehatan fisik. Rendahnya kualitas kesehatan fisik dan diakibatkan oleh rendahnya gizi makanan yang mereka konsumsi sehari-hari, dan kondisi lingkungan yang buruk serta penyakit infeksi.

1. Tingkat penghasilan yang rendah dan tidak menentu

Hidup kaum gelandangan penuh dengan perjuangan-perjuangan untuk mengorganisasi aktivitas mereka dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan yang relative langkah, mereka harus dapat bersaingan untuk sekedar dapat makan dan bertahan hidup di daerah perkotaan.

1. Metalitas semakin buruk

Pemerintah sosial, hampir segala upaya untuk menjalin hubungan dengan sikap curiga, deskriminasi, ketidakpercayaan dan pandangan-pandangan negative lainnya itulah gelandangan tersebut untuk menjadi metalitasnya semakin buruk.

Dampak terhadap masyarakat yaitu:

1. Tingkat keamanan menjadi tergganggu

Pada hakikatnya kehadiran gelandangan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak karena masyarakat menganggap bahwa kehadiran gelandangan tersebut tingkat keamanan mereka merasa terganggu.

1. Tingkat kebersihan menjadi kurang

Keberadaan gelandangan seringkali dijadikan alasan mengganggu kebersihan kota padahal gelandangan juga manusia yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan, perlindungan dari pemerintahan.

1. Tingkat keindahan lingkungan terganggu

Gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal, mereka tinggal di wilayah sebetulnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : teman-teman oleh karena itu kehadiran mereka di kota-kota sangat terganggu ketenangan masyarakat serta kebersihan dan keindahan kota.

1. **Kerangka Pikir**

Berikut ini penulis kemukakan dalam bentuk bagan:

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar

Gelandangan

Kendala apa yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam upaya meminimalisir gelandangan

Bentuk perlindungan dan pembinaan gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar

Penanganan Gelandangan Di Kota Makassar

Gambar.2.1 Skema Kerangka Pikir

# BAB III

# METODE PENELITIAN

* + - 1. **Variabel dan Desain Penelitian**
1. **Variabel Penelitian**

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi objek sasaran atau titik pandang dari kegiatan penelitian.[[27]](#footnote-28) Adapun variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu “perlindungan dan pembinaan gelandangan di kota Makassar ”.

1. **Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan suatu rancangan, atau pola (model) penelitian. Desain penelitian pada dasarnya digunakan penulis dalam rangka memudahkan untuk melakukan penelitian dan agar penelitian tersebut menjadi terarah.

Desain penelitian ini menggunakan metode survey yang dimaksudkan untuk mengkaji dari segi perlindungan dan pembinaan gelandangan di Kota Makassar tinjauan sesuai dengan peraturan daerah kota Makassar No.2 Tahun 2008 di Kota Makassar.

* + - 1. **Devinisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari kesalahan dalam penerjemahan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah tersebut, diantaranya:

1. Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan gelandangan yang mengalami masalah sosial.
2. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial untuk mengatasi masalah gelandangan.
3. Gelandangan yang dimaksud adalah anak yang berumur antara 14 - 18 tahun tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan tidak memiliki arah dan tujuan hidup.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik di propinsi maupun di Kabupaten/Kota.
	* + 1. **Populasi dan Sampel**
5. **Populasi**

Menurut Sukardi bahwa populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.[[28]](#footnote-29)

Populasi merupakan objek suatu penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain populasi adalah semua jumlah responden yang dijadikan objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial yang terlibat langsung dalam proses pembinaan gelandangan di kota Makassar yang berjumlah 15 orang.

1. **Sampel**

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar bahwa sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.[[29]](#footnote-30)

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Jadi sampel yang di ambil berjumlah 5 orang atau keseluruhan berjumlah populasi.

* + - 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pada wilayah yang dijadikan objek penelitian. Objek penelitian dilakukan terhadap Gelandangan di Kota Makassar.

1. **Wawancara**

Wawancara dalam kegiatan tanya jawab secara langsung dilakukan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber terpilih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada pejabat daerah kota Makassar.

1. **Dokumentasi**

Menurut Sukardi bahwa dokumentasi adalah informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.[[30]](#footnote-31)

Untuk data dalam bentuk dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data tertulis tentang studi tentang perlindungan dan pembinaan gelandangan.

* + - 1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis data dari hasil wawancara dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh diorganisasi dalam kategori, dijabarkan kedalam unit-unit, dipilih mana yang penting yang biasa disajikan untuk dibuat sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Profil Dinas Sosial Kota Makassar**
2. **Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makasssar**

 Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

 Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

 Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499 m2, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat
5. **Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :

**Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat Tahun 2014**

 Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial Sebagai berikut **:**

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan pehatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
4. Melakukan jaminan sosial
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakehoders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.
4. **Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Kepegawaian
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Perlengkapan
6. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
8. Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
9. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
10. Bidang Rehabilitasi Sosial
11. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
12. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
13. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.
14. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
15. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
16. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
17. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
18. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial
19. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
20. Seksi Biimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
21. Seksi Pelestarian Nilai Kepahalawanan, Keperintisan dan Kejuangan
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL SESUAI PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NO. 34 TAHUN 2009

KEPALA DINAS

Drs. H. YUNUS SAID, M.Si

SEKRETARIS

Drs. HASENG DM, MM

KASUBAG KEUANGAN

Dra. ST. AMIRAH SAMBE, M.Si

KASUBAG PERLENGKAPAN

MUHAMMD DARWIS YUNUS, SE

KASUBAG UMUM & KEPEG

Dra. SRI SOSIAWATI LATIF

KABID BJKS

BURHANUDDIN GHAIB, SE,MM

KABID BIMBINGAN ORSOS

Drs. ENY ADRIYANI, M.Si

KABID UKS

Drs M. IHSAN IDRIS, MM

KABID RENSOS

Drs. H. MAS’UD. S, MM

KASI BIMB. SUMBANGAN SOSIAL

Dra. ST. ROSDIANA B, M.Si

KASI PEMB. FAKIR MISKIN

SITTI HAJAR, S.Sos

KASI REHAB. PACA

HASNAH A, S.Sos, M.Si

KASI PENYL.SOSIAL & PENELITIAN

HATMA, S.Sos

KASI REH. TUNA SOSIAL

M. ARSYAD THAMAL, S.Sos

KASI BIMB. ORSOS & AT

DANIAL LAISOUW, SE

KASI PENANGANAN KORBAN BENCANA

Drs. ABD. RAHMAN, M.Si

KASI PK & PMKS

Dra. HARTATI, M.Si

KASI PEMB. ANJAL & GEPENG

HAIDIR HAMZAH, S.S.T.P

KASI PELESTARIAN NKKK

SITTI FARIDA S.Sos

KASI JAMINAN KESEJ. SOSIAL

LA HERU, S.Sos, M.Si

KASI REHAB. PACA

NURARSYAH, SH

KEPALA UPTD

Dra. YUYUN YULIAWATI, M.Si

Gambar 4.1. Skema Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Makassar

**Tabel 4.1 frekuensi jumlah Gelandangan dari tahun 2010-2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **GELANDANGAN** |
| 1 | 2010 | 186 |
| 2 | 2011 | 204 |
| 3 | 2012 | 269 |
| 4 | 2013 | 305 |
| 5 | 2014 | 555 |
| 6 | Jumlah | 1214 |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar*

1. **Bentuk Pembinaan dan Perlindungan Gelandangan**

Jika kita mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Maka dapat diketahui bawa ada 3 bentuk pembinaan yaitu: (a) pembinaan pencegahan, (b) pembinaan lanjutan, dan (c) usaha rehabilitasi sosial.

Sebelum melakukan proses pembinaan terlebih dahulu di adakan yang namanya patroli dalam Dinas Sosial Kota Makassar di kenal dengan nama Patroli PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Dimana dalam patroli ini terdiri dari 22 orang yaitu: lima orang dari POLRESTABES, lima orang dari SATPOL PP, dan sisanya dari Dinas Sosial.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Hasnah A. S.Sos, M.Si selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat mengatakan bahwa

“dalam melakukan razia gelandangan kami membentuk suatu Tim khusus yaitu PMKS (Penyandang Masalah Kesejatraan Sosial) yang dibantu oleh POLRESTABES dan SATPOL PP kami melakukan razia serempak pada hari ju’mat untuk menjaring para gelandangan, anak jalanan, pengemis dan pengamen. Akan tetapi kami dari Dinas Sosial setiap hari melakukan razia”[[31]](#footnote-32)

Pada dasarnya patroli dilakukan untuk menjaring atau merazia para gelandangan. Ini dilakukan setiap harinya oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan setiap hari Ju’mat di adakan razia penuh yang melibatkan POLRESTABES dan SATPOL PP. Keterlibatan tersebut diharapkan mampu membantu apabila ditemui gelandangan yang nakal dan susah diatur, selain itu keikut sertaan polisi dapat membantu proses pengejaran apabila gelandangan kabur. Setelah dilakukan patroli kemudian diadakan pembinaan sebagai berikut:

1. **Pembinaan Pencegahan**

Pembinaan pencegahan pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah dan berkembangnya jumlah gelandangan di kota Makassar. Pada dasarnya Dinas Sosial Kota Makassar dalam melakukan pembinaan pencegahan telah merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Hatma, S.Sos selaku Kasi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.mengatakan bahwa:

”….dalam pembinaan pencegahan langkah awal yang kami lakukan untuk saat ini adalah melakukan pendataan dengan menggali informasi dari gelandangan, mengadakan sosialisasi dan kampanye serta pemantauan, pengendalian dan pengawasan selain itu kami melakukan pengadakan posko dibeberapa titik titik perempatan yang ada di Kota Makassar. Ini dilakukan untuk menindaki anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang ada di sekitar lampu merah untuk didata dan diberikan pengarahan.”[[32]](#footnote-33)

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Pendataan

Pembinaan pencegahan dilakukan pertama adalah pembuatan posko di sepuluh titik persimpangan jalan yang ada di kota Makassar yang selanjutnya melalui posko tersebut dilakukan kegiatan pendataan langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, SATPOL PP, dan masyarakat yang ada di sekitar. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut dapat diketahui data yang berisikan tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi keluarganya.Agar lebih jelasnya dapat di perhatikan skema berikut ini:

**Dinas Sosial**

**Nama**

**Patroli**

**Posko**

**Alamat**

Pemantauan pengendalian dan pengawasan

Mencari Informasi Keberadaan Gelandangan

**Daftar Keluarga**

**Kondisi Tempat tinggal**

**Pendataan**

 Gambar: 4.2 Skema Proses Pendataan Gelandangan

Dari data sekunder yang sudah diolah di atas dapat ditelusuri bahwa pembinaan pencegahan dilakukan pertama adalah pembuatan posko di sepuluh titik persimpangan jalan yang ada di kota Makassar yang selanjutnya melalui posko tersebut dilakukan kegiatan pendataan langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, Satpol PP, POLRESTABES, dan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut dapat diketahui data yang berisikan tentang nama, alamat, daftar keluarga, dan kondisi.

1. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan POLRESTABES dan lainnya setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari gelandangan tersebut.

Dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar bekerjasama dengan POLRESTABES dan SATPOL PP nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan gelandangan di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. Kegiatan patroli pada tahap pembinaan pencegahan ini dilakukan hanya untuk sekedar mengetahui lokasi-lokasi yang dijadikan tempat atau kawasan lokasi dimana gelandangan tersebut melakukan aktivitasnya.

Untuk lebih jelasnya perhatikan skema berikut ini:

**Daya**

**14**

**UHAS**

**13**

**11**

Abdesir – borong raya

**BTP**

**15**

**6**

Adyaksa baru

**4**

Bandara Hasanuddin

Jln.

Alauddin

Adyaksa MP

**6**

Abdesir Adyaksa

**10**

Boulevard

**8**

Perintis kemerdekaan

Kantor Gubernur

Jln AP. Petarani

Jalan Landak vetran

Sungai sadang

Fly Over

**1**

Jln. Andi Tonro

**9**

**9**

Bawakaraeng Vetran

**16**

Vetran

Mesjid raya

**17**

UVRI

**18**

Tentara pelajar

Hotel sahid

**24**

karebosi

**19**

Gubernur

Jln sudirman

Jln. Kakak tua

**23**

Balaikota

**20**

Jln H. bau Arif Rate

**22**

hasanuddinnnnnn

**21**

 Gambar: 4.3 Skema Titik Patroli Di Kota Makassar

1. Sosialisasi dan kampanye

Setelah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan melalui kegiatan patroli kemudian selanjutnya Dinas Sosial kota Makassar menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan.

Kegiatan kampanye dan sosialisasi dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Makassar. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan. Sedangkan bentuk sosialisasi sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung.

 Sosialisai secara langsung sendiri dilakukan dalam bentuk ceramah maupun interaksi yang memberikan informasi kepada seseorang atau sekelompok orang melalui tatap muka atau dialog secara langsung, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung sendiri dilakukan melalui media cetak maupun di media elektronik sebagai media perantara antara pemerintah kepada masyarakat sebagai objek dari peraturan. Namun, pada intinya kegiatan itu semua tidak akan terlaksana tanpa adil yang besar dari masyarakat Kota Makassar itu sendiri.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Hatma, S.Sos selaku Kasi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.mengatakan bahwa:

“kami yang bergerak pada bidang penyuluhan dan penelitian sering kali kami melakukan sosialisasi dengan cara melakukan penyuluhan tentang hukuman yang diberikan kepada pihak orang tua yang tidak mempedulikan anaknya yang hidup dijalanan dalam hal ini gelandangan, membagikan brosur dan pemasangan spanduk, selain itu kami juga memasang penyuluhan pada media elektronik seperti Radio dan TV terkadang juga kami berbincang langsung dengan masyarakat.”[[33]](#footnote-34)

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan skema berikut ini:

**DINAS SOSIAL**

 LINGKUNGAN MASYARAKAT

LANGSUNG

Melalui ceramah

& interaksi

secara langsung

Pertunjukkan

**KAMPANYE**

**SOSIALISASI**

Orasi dan pemasangan spanduk dan baliho

TIDAK LANGSUNG

Melalui media cetak

dan elektronik

 Gambar: 4.4 Skema Proses Kampanye dan Sosialisasi

1. **Pembinaan Lanjutan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang menitik beratkan ke peminimalisiran jumlah gelandangan yang melakukan aktifitasnya di tempat-tempat umum dan sering kali meresahkan masyarakat. Pembinaan lanjutan juga lebih mengarah kepada keberlangsungan hidup mereka. Selain itu pembinaan lanjutan juga sebagai lanjutan dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haider Hamzah, S.S.T.P selaku Kasi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen menyatakan bahwa:

”…untuk menindak lanjuti pembinaan awal, kami kemudian memberikan pengarahan kepada mereka melalui posko yang kami bentuk. Pengarahan yang kami berikan adalah berupa larangan untuk melakukan aktifitas dijalanan dan memberikan mereka alternatif berupa rehabilitasi sosial dan penyekolahan bagi anak usia sekolah. Tetapi walaupun sudah ada posko yang kami buat kami tetap melakukan kegiatan patroli, ketika patroli dilakukan lantas masih ada yang kami temui sedang melakukan aktifitasnya, maka langsung kami jaring dan membawahnya kekantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dari yang terjaring razia. Selanjutnya diberikan surat pernyataan yang terjaring untuk tidak lagi melakukan aktifitas dijalanan, dan ketika itu masih terulang maka kami langsung temui orang tuanya dan meminta persetujuan apakah anaknya mau direhab atau diserahkan kepada orang tua dengan syarat memberikan perjanjian apa bila hal ini terulang maka orngtua dapat dijerat dengan hukuman penjara berdasarkan undang-undang perlindungan anak Ini dilakukan sebagai bentuk pemberian perlindungan yang kami lakukan kepada mereka sehingga memberikan efek jerah.”[[34]](#footnote-35)

Berdasarkan pernyataan tersebut yang diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar bahwa untuk menindak lanjuti pembinaan kepada gelandangan ada beberapa kegiatan yang Dinas Sosial lakukan yang bekerja sama dengan pihak-pihak instansi lainnya. Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam tahap pembinaan lanjutan ini salah satunya yaitu mengadakan kegiatan pembuatan posko. Pembuatan posko pada tahap ini sebagai bentuk pengendalian kepada gelandangan untuk menekan laju pertumbuhan mereka, serta mengungkap masalah pokok yang mereka hadapi berdasarkan atas situasi dan kondisi pada saat dilakukannya kegiatan posko tersebut.

Kegiatan posko ini tidak lebih dari lanjutan kegiatan sosialisasi dan kampanye perlu diketahui bersama bahwa pada kegiatan pelaksanaan posko ini pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan beberapa unsur yaitu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan unsur Kepolisian. Namun, walaupun dalam kegiatan ini melibatkan pihak Satpol PP maupun pihak Kepolisian, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan posko tidak dilakukan penangkapan, melainkan hanya sebatas pengungkapan akan masalah yang dihadapi tiap-tiap gelandangan. Selain pembuatan posko Dinas Sosial masih tetap turun melakukan patroli langsung untuk segera menjaring yang kedapatan (tertangkap basah) masih melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian.

Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya di arahkan ke Panti Rehabilitasi Sosial. Ditempat tersebut akan ditampung secara sementara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau outbond. Selain itu, dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada gelandagan dengan cara mengindetifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga yang mereka masih saja melakukan aktivitasnya di jalanan.

 Dari identifikasi dan seleksi tersebut, dapat diketahui permasalahan utama yang di hadapi gelandangan. Setelah diketahui masalahnya maka pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan instansi terkait dapat mengungkapkan dan memahami masalah serta apa yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sebelum memutuskan upaya apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut, maka dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi - instasni terkait malakukan temuan pembahasan untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk menangani berbagai permasalahannya. Setelah diketahui lebih dalam maka diadakan pendampingan secara individual, artinya dalam pendampingan ini bukan saja mereka yang terjaring yang mendapatkan bimbingan tersebut melainkan juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga bersangkutan secara rutin dan berkesinambungan untuk menentukan apakah yang terjaring akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat baik itu diikutkan dalam pendidikan secara formal maupun non-formal atau secara bersyarat yang berarti tidak akan kembali melakukan aktivitasnya di jalan atau tetap tinggal di panti guna dilakukan pengrehabilitasian sebelum dikembalikan ke lingkungan. Untuk lebih memahami alur tentang pembinaan lanjutan penulis telah membuatkan skema tentang pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar

PEMBUATAN POSKO

* DINAS SOSIAL
* SAT POL PP
* KEPOLISIAN
* LEMBAGA SOSIAL (LSM)
* MASYARAKAT

**DINAS SOSIAL**

**PATROL I**

**PENGARAHAN**

**SOSIALISASI**

Yang terjaring

dibawah ke Panti

Sosial untuk

direhabilitasi

PENGENDALIAN SEWAKTU-WAKTU

KETIKA MENDAPATI ANAK JALANAN,

GELANDANGAN, PENGEMIS DAN

PENGAMEN YANG MELAKUKAN

AKTIFITAS DI TEMPAT-TEMPAT UMUM

KEGIATAN BIMBINGAN

* BIMBINGAN SOSIAL
* BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL
* BIMBINGAN HUKUM
* PERMAINAN ADAPTASI SOSIAL
* (OUTBOUND

PENDEKATAN

IDENTIFIKASI DAN PENYELEKSIAN

* IDENTITAS DIRI
* LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
* STATUS SOSIAL
* MASALAH LINGKUNGAN DARI ANAK TERSEBUT

MENGUNGKAP DAN

MEMAHAMI MASALAH

SERTA KEBUTUHAN

BAGI YG TERJARING

RAZIA

PENDAMPINGAN SOSIAL

PENDIDIKAN FORMAL/NON

FORMAL ATAU DIKEMBALIKAN

KE LINGKUNGAN MASING-MASING

PEMBINAAN

REHABILITASI SOSIAL

DIRUJUK KE TAHAP

SELANJUTNYA

. Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

* + 1. Pendekatan awal

 Gambar: 4.5 Skema Pembinaan Lanjutan

Proses pendekatan ini dilakukan oleh pihak Dinas Sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dengan melaksanakan penertiban dan selanjutnya di data dan selanjutnya identifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya apakah akan dikembalikan kekeluarga atau akan dilakukan rehabilitasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Drs. Mas’ud, S.MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa:

”dalam pembinaan rehabilitasi yang pertama kali dilakukan adalah pendekatan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggalih lebih dalam lagi informasi dan mencari inti permasalahan mengapa seseorang bergelandangan. Setelah diketahui inti pemasalahannya barulah dilakukan proses rehabilitas sesuai dengan kondisinya. Ketika gelandangan tersebut masih usia sekolah selain kami melakukan bimbingan secara umum seperti bimbingan spiritual, fisik, dan bimbingan sosial, kami juga memberikan bantuan seperti menyekolahkannya, dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak berprestasi untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Dan bagi gelandangan yang usia produktif kami ajarkan keterampilan setelah itu memberikan kepada mereka modal usaha sehingga mereka memiliki aktifitas yang lebih positif ”.[[35]](#footnote-36)

Setelah dilakukan proses pendataan baru kita masuk ketahap berikutnya yakni pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya.

* + 1. Pengungkapan dan pemahaman masalah

Berdasarkan data awal yang diperoleh kemudian dilakukan yang namanya Pengungkapan dan perumusan rencana pelayanan dalam upaya untuk mengetahui bimbingan apa yang cocok diberikan yang sesuai dengan persoalannya masing-masing. Karena tidak semuanya para gelandangan yang terazia harus di rehabilitasi terkadang juga kami pulangkan ke orang tuanya dan apabila perlu dibina terlebih dahulu membicarakan kepada pihak keluarga ketika si gelandangan tersebut masih memiliki keluarga.

Adapun aspek-aspek dalam assessment meliputi:

1. Fisik :Yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah kondisi riwayat dari anjal dan gepeng seperti riwayat sakit ataukah yang menyangkut masalah pantangan mereka.
2. Mental spiritual/psikologis: Yang dapat dipahami dari kegiatan ini adalah mencakup kepribadian, kecerdasan, kemampuan, dan kematangan emosi termasuk bakat, minat dan lain-lainnya.
3. Sosial : Mencakup kondisi keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal, termasuk pola pendidikan dalam keluarga dan komunikasi yang selama ini diterapkan.
4. Keterampilan: Ini mencakup pendidikan formal dan non formal, keterampilan yang telah dikuasai klien termasuk pekerjaan yang pernah ditekuni sebelum menjadi klien didalam panti.
5. **Usaha Rehabilitasi Sosial**

Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan pada hasil assessment yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Hasil dari asessment tersebut nantinya akan berkelanjutan, artinya hasil assessment dilakukan tidak hanya di awal proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan di saat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Panti sosial sendiri dalam kegiatan bimbingan kerjanya menggunakan yang sistemasit tentang materi, waktu, metode pelaksanaannya, dan sasarannya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan pelaksanaan bimbingan diantaranya :

1. **Bimbingan Mental dan Spiritual**

Pembinaan bimbingan mental dan spiritual yaitu, dengan melakukan pembentukan sikap serta perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk perkelompok. Dalam pemberian bimbingan mental spiritual ada hal -hal yang dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan. Hal ini dilakukan dalam betuk siraman rohani atau ceramah, diajarkan pula tata cara sholat dan mengaji. Bimbingan ini bertujuan untuk mengubah mental, moral, dan kepribadian serta menanamkan nilai-nilai agama agar sekiranya dapat lebih baik lagi dibanding pada saat hidup dijalanan.Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan table berikut ini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan bimbingan** | **Frekuensi waktu pelaksanaan** | **Tahun** | **Peserta Bimbingan** | **Pelaksana** |
| Mengaji | 3 kali seminggu (Senin, rabu, dan jum’at ) selama 2 jam | **2014** | **Gelandangan** | * ***Lembaga pendidikan AN-Nur***
 |
| Shalat | Setiat hari Jumat selama 2 jam |
| Pendidikan Akhlak | Setiap hari selasa selama 1 jam | **2014** | **Gelandangan** | * ***Dinas Sosial Kota Makassar***
 |
| Pembentukan Etika dan Moral | Setiap hari selasa selama 2 jam |

**Tabel 4.2 kegiatan Bimbingan Sosial Mental Spritual**

*Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar*

1. **Bimbingan Fisik**

Bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-kegiatan, seperti kegiatan olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan selain itu untuk melatih otot dan menjaga kebugaran tubuh.

 **Tabel 4.3 Kegiatan Pembinaan Dalam Bentuk Bimbingan Fisik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peserta Bimbingan | Kegiatan | Frekuensi waktupelaksanaan | Pelaksana Kegiatan |
| * Gelandangan
 | Olah raga | Pada hari Minggu selama 2 jam | * Dinas Sosial Kota Makassar
 |
| * Gelandangan
 | Seni  |

 *Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar*

Bersadarkan table 4.3 diatas dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada Gelandangan selama pembinaan Gelandangan dalam bentuk bimbingan fisik yaitu diadakan kegiatan olahraga dan permainan outbond dengan tujuan agar memberikan hiburan kepada para Gelandangan tersebut.

1. **Bimbingan Sosial**

Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja. Hal Ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial/tatanan kehidupan masyarakat. Bimbingan sosial ini menumbuh kembangkan dan meningkatkan secara mantap kesadaran tanggung jawab sosial untuk berintegrasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normative, misalnya pada saat melakukan out bond, permainan yang cukup menantang dan membutuhkan konsentrasi, baik tenaga maupun pikiran, serta membutuhkan adanya saling kerja sama.

Bimbingan sosial ini bertujuan agar anak-anak tersebut memotivasi dan dapat menumbuh kembangkan akan kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat disamping itu, pemberian bimbingan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh gelandangan tesebut baik itu yang sifatnya perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja.

1. **Bimbingan Keterampilan**

Sebelum pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan sebelumnya adalah menemukan bakat atau keterampilan apa yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki.

Ketika sudah dianggap sudah mampu dan terampil serta mampu menghasilkan uang dari hasil keterampilan yang dimilikinya barulah dilakukan pelepasan. Dilepasnya artinya bukan dilepas begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.

Pada dasarnya semua program atau bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan oleh Dinas Sosial selalu dibuatkan laporan kegiatannya kemudian, dari hasil laporan tersebut di evaluasi apa yang menjadi kendala dari setiap program pembinaan yang di berikan.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan table berikut ini:

**Tabel 4.4 Bentuk Kegiatan Bimbingan Keterampilan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Peserta Bimbingan | Jenis Keterampilan | Frekuensi waktupelaksanaan | Lembaga Pelaksana |
| 20 orang20 orang20 orang | * Pembuatan kerajinan
* Perbengkelan
* Paket pendidikan
 | Setiap hari rabu selama 2 jam | * Pemberdayaan perempuan
* LPK ARA
* Pemberdayaan perempuan
 |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar*

1. **Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial selaku Pemerintah Kota Makassar Dalam Meminimalisir Gelandangan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Drs. Mas’ud, S.M.M selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa:

“sebenarnya kami selaku Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya meminimalisir gelandangan dikota Makassar sudah bisa dikatakan cukup berhasil dan dalam melaksanakan tugas kami merasa tidak menghadapi kendala karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas sudah terciptanya regulasi, terjalin kerja sama yang baik dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, tersedianya sumber daya yang memadai dalam melakukan proses pembinaan, dan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang memadai”.[[36]](#footnote-37)

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai landasan hukum yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal meminimalisir jumlah gelandangan yang beroprasi dan beraktivitas di tempat -tempat umum, ada beberapa hal yang mendukung dijalankannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya yaitu :

1. **Tersedianya Regulasi (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Data Terlampir)**

Pemerintah kota Makassar sejak Tahun 2008 sudah membuat suatu regulasi atau aturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang pembinaan gelandangan di kota Makassar. Dimana tujuan utama dari pembuatan aturan tersebut yaitu sebagai alat (dasar hukum) yang dipakai dalam meminimalisir atau mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar dengan cara memberikan pembinaan sebagai mana yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa mereka yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi berprofesi sebagai gelandangan atau pengemis yang berkeliaran di tempat-tempat umum, tetapi mereka telah memiliki kemampuan atau skill untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dia miliki setelah di berdayakan.

1. **Terjalinnya Kerjasama Yang Baik Antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Perusahaan Swasta**

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan instansi yang terkait sudah menjadi tanggung jawab untuk melakukan pengadaan yang lebih memadai dalam membina gelandangan ini. Hal ini secara jelas sudah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi yang terkait dengan menanda tangani MOU (Memories Of Understanding). Dimana MOU tersebut merupakan dasar atau sebuah kontrak kerja sama untuk pengadaan stimulant peralatan kerja dan pelatihan keterampilan untuk gelandangan yang sudah menguasai materi yang telah diberikan saat mereka berada dipanti rehabilitasi.

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial kota Makassar telah menanda tangani kontrak kerja sama kepada perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Hasil dari kerjasama tersebut telah memberikan dampak positif bagi mereka yang terjaring dan telah ditempatkan di beberapa perusahaan swasta yang berada di kota Makassar. Untuk pelatihan keterampilan, direncanakan akan menyentuh sekitar 60 orang. Jenis pelatihan yang diberikan menyangkut kewirausahaan dengan modal kecil. Sementara untuk anak miskin putus sekolah direncanakan akan bersekolah dan jumlah anak yang akan disekolahkan sekitar 400 anak. Disamping itu, mereka yang telah di tempatkan di perusahaan-perusahaan swasta diberi upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan atau profesi yang dimilikinya serta sesuai dengan jenjang karir dalam perusahaan tersebut.

Adapun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinas seperti kepolisian yang membantu dalam melakukan patrol, Lembaga pendidikan AN-Nur yang membantu dalam hal memberikan bimbingan yang seperti pengajaran tata cara shalat dan megaji, pihak pemberdayaan perempuaan yang memberikan pengajaran tentang pebuatan kerajinan, dan beberapa bengkel dimakassar untuk memberikan pemahaman dan skil bagi para gelandangan khusus untuk laki-laki.

1. **Tersedianya Sumber Daya Yang Memadai Untuk Membina Gelandangan di Kota Makassar.**

Walaupun isi suatu kebijakan sudah baik dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi bila sumber daya kurang memahami dan kurang melaksanakan, implementasi dari suatu kebijkan tidak akan berjalan efektif. Implementasi dari suatu kebijakan memerlukan dukungan baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya non-manusia (non-human resources),

Karenanya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, penempatan aparatur di tiap-tiap posko gelandangan cukup memadai. Kinerja dari pegawai maupun aparatur baik dari Dinas Sosial Kota Makassar maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga dirasa dampaknya oleh gelandangan dan masyarakat sekitar.

1. **Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Program Pembinaan Gelandangan Di Kota Makassar**

Dalam membina gelandangan disamping aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dibutuhkan pula sarana seperti rumah singgah, posko-posko pemantauan gelandangan, dan beberapa prasarana di panti rehab sebagai upaya pemberdayaan gelandangan tersebut. Dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut dalam memberikan sarana dan prasarana, pemerintah Kota Makassar menjalani kerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinas Sosial Provinsi Kota Makassar, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan Polisi. Dengan adanya sarana dan prasarana program pembinaan gelandangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun sarana dan parasarana Dina social sebagai berikut:

1. Bangunan
2. Kantor : 1 unit
3. Asrama : 5 unit
4. Aula : 1 unit
5. Ruang keterampilan : 1 unit
6. Ruang seni : 1 unit
7. Gudang : 1 unit
8. Musholah : 1 unit
9. Poliklinik : 1 unit
10. Kendaraan
11. Mobil patroli : 1 unit
12. **Anggaran Yang Memadai**

Mengenai anggaran yang merupakan faktor pendukung dari program pembinaan Gelandangan di Kota Makassar, pihak Dinas Sosial Kota Makassar tidak megalami hambatan. Meskipun anggaran merupakan hal yang sangat krusial untuk mengembangkan suatu program, tetapi tidak bagi Dinas Sosial Kota Makassar. Anggaran yang didapat dari Dinas Sosial Kota Makassar diperoleh dari pusat. Dilansir dari media online bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Makassar telah menguncurkan dana yang merupakan tabungan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000 bagi setiap anak jalanan dan gelandangan.

Walaupun pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial sudah berusaha semaksimal mungkin dalam meminimalisir laju pertumbuhan gelandangan di Kota Makassar tetapi masih saja kita jumpai gelandangan di jalan karena pasalnya sejumlah anak jalanan atau gelandangan yang terjaring dalam razia yang kemudian dimasukkan dalam tempat tertentu untuk diberikan pembinaan dan keterampilan lainnya, tidak bisa menjamin mereka untuk tidak akan kembali lagi ke jalan. Selain itu, yang menyebabkan masih adanya gelandangan yang kita jumpai di jalan hal ini di karenakan kepandaian para gelandangan dalam membaca situasi dan kondisi ketika ada razia mereka bersembunyi dan tidak bisa tertangkap untuk di berikan pembinaan.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil pengamatan dan pembahasan penelitian ini , maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pembinaan Pencegahan: Pada pembinaan ini langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pendataan dengan menggali informasi dari gelandangan, mengadakan sosialisasi dan kampanye serta pemantauan, pengendalian dan pengawasan selain itu melakukan pengadakan posko dibeberapa titik-titik perempatan yang ada di Kota Makassar
2. Pembinaan Lanjutan : Dalam pembinaan ini Dinas Sosial berupaya melakukan kegiatan pembinaan kepada para gelandangan berupa membentuk posko dibeberapa titik patroli kemudian memberian pengarahan yang berupa larangan untuk melakukan aktifitas dijalanan dan memberikan mereka alternatif berupa rehabilitasi sosial dan penyekolahan bagi anak usia sekolah, setelah itu diadakan pendekatan untuk mencari titik persoalan atau pemahaman masalah masing-masing gelandangan. Kemudian di berikan pendampingan yang melibatkan pihak keluarga dan bersama-sama memberikan keputusan apakah anaknya dibimbing di rumah atau ingin di rujuk ke tempat rahabilitasi.
3. Usaha rehabilitasi sosial: Dalam pembinaan ini merupakan kelanjutan dari pembinaan sebelumnya setelah melakukan pendekatan dan pemahaman masalah barulah ditentukan langkah apa yang harus diberikan kepada gelandangan yang diseuaikan dengan kebutuhannya baik itu pemberian bimbingan mental spritual seperti (siraman rohani atau ceramah, diajarkan pula tata cara sholat dan mengaji), bimbingan fisik seperti (kegiatan olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan), bimbingan sosial seperti (melakukan out bond dan permainan yang yang didalammya mengajarkan kerja sama, kemandirian dan kerja keras agar dapat bertahan dalam lingkungan sosialnya.), dan bimbingan keterampilan seperti (pemberian keterampilan menjahit, membuat kerajinan tangan sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki)
4. Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya memanimalisir gelandangan di kota Makassar sudah bisa dikatakan cukup berhasil dan dalam melaksanakan tugas kami merasa tidak menghadapi kendala karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas sudah terciptanya regulasi, terjalin kerjasama yang baik dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, tersedianya sumber daya yang memadai dalam melakukan proses pembinaan, dan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang memadai.
5. **Saran**
6. Kepada Dinas Sosial adalah teruslah mempertahankan prestasi yang telah dilakukan dan teruslah berusaha mencari alternatif yang lebih baik lagi dalam memanimalisir pertumbuhan gelandangan di kota Makassar.
7. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan pemantaun terhadap gelandangan dan melaporkan segera ketika melihat ada gelandangan di masyarakat atau di jalan.
8. Bagi orang tua agar senantiasa berusaha menjaga anak dan mendidik anak agar tidak terlibat aktifitas dijalan sehingga menyebabkan anak menjadi gelandangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Argo Twikromo.1999. *Gelandangan Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma

 Jaya.

Barda Nawawi Arief . 1998. *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

 *Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Dirjen bina rehabilitasi sosial. 2005. *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*

 *Gelandangan*. Yogyakarta: Bina Karya

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*.

 Jakarta: Bumi Aksara.

Pius A Parto dan M Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Imiah Populer*. Surabaya:

 Arbola

Romli Atmasasmita. 1997. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Suharsimi Arikunto. 2010. Manajemen penelitian. Jakarta: Rineka cipta.

Suparlan Parsudi. 1993. Kemiskinan Di Perkotaan. Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Sukardi. 2003. Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

**Undang-Undang:**

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar

**Skripsi :**

Ervina. 2014. *Implementasi Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar (Studi Tentang Pada Anak Jalanan).* Makassar: Universitas Negeri Makassar.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-2)
2. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-3)
3. Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal.

165. [↑](#footnote-ref-4)
4. Barda Nawawi Arief , 1998, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

 *Pengembangan Hukum Pidana* , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 155. [↑](#footnote-ref-5)
5. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-6)
6. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-7)
7. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-8)
8. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-9)
9. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-10)
10. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-11)
11. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-12)
12. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-13)
13. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-14)
14. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-16)
16. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-17)
17. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-18)
18. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-19)
19. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-20)
20. Pius A Parto dan M Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Imiah Populer*. Arbola. Surabaya. Hlm 662 [↑](#footnote-ref-21)
21. Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008 [↑](#footnote-ref-22)
22. Suparlan Parsudi.1993. Kemiskinan Di Perkotaan. Yayasan obor Indonesia. Jakarta. Hlm 163 [↑](#footnote-ref-23)
23. Argo Twikromo.1999. *Gelandangan Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, hal, 6 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-25)
25. Dirjen bina rehabilitasi sosial. 2005. *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan.* Bina Karya. Yogyakarta. Hlm. 11-12 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid. Hlm. 9-15 [↑](#footnote-ref-27)
27. Suharsimi arikunto. 2010. Manajemen penelitian. Rineka cipta. Jakarta. hlm 17 [↑](#footnote-ref-28)
28. Sukardi. 2003. Metodologi penelitian pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta. hlm 53 [↑](#footnote-ref-29)
29. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm 44 [↑](#footnote-ref-30)
30. Sukardi. Op. Cit. hlm. 81 [↑](#footnote-ref-31)
31. Hasil wawancara tanggal 27 Mei jam 9 [↑](#footnote-ref-32)
32. Hasil wawancara tanggal 1 Juni jam 10 [↑](#footnote-ref-33)
33. Hasil wawancara tanggal 1 Juni jam 10 [↑](#footnote-ref-34)
34. Hasil wawancara tanggal 5 Juni jam 11 [↑](#footnote-ref-35)
35. Hasil wawancara tanggal 10 Juni jam 10 [↑](#footnote-ref-36)
36. Hasil wawancara tanggal 10 Juni jam 10 [↑](#footnote-ref-37)